

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR PEMERINTAH KOTA MANADO

(Studi Kasus di Kecamatan Singkil)

INDAH PUTRI RAHAYU

WELSON Y. ROMPAS

SALMIN DENGO

## *Abstract*

*The purpose of this research is to find out how the flood management policies implemented by the Manado City Government in Singkil District. This research uses descriptive qualitative research using the Theory of Policy Implementation by Van Meter Van Horn. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The data analysis technique used was data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of the study found that the flood management policies of the Manado City Government in Singkil District had not been implemented thoroughly. This was found through the results of observations and interviews, namely that there are still some flood-prone areas in Singkil District that have not been touched for the construction of embankments and river normalization as a form of flood control in Singkil District. It is hoped that there will be more attention from the Government in the construction of embankments and river normalization in Singkil District and awareness from the community not to littering which is at risk of clogging drainage channels and causing flooding in Manado City.*

*Keywords: Policy Implementation, Countermeasures, Flood*

## **Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan banjir Pemerintah Kota Manado di Kecamatan Singkil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter Van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa kebijakan penanggulangan banjir Pemerintah Kota Manado di Kecamatan Singkil belum diimplementasikan secara menyeluruh. Hal ini ditemukan melalui hasil observasi dan wawancara yakni masih ada sebagian daerah rawan banjir di Kecamatan Singkil yang belum disentuh untuk pembangunan tanggul dan normalisasi sungai sebagai bentuk pengendalian banjir di Kecamatan Singkil. Sangat diharapkan adanya perhatian lebih dari Pemerintah dalam pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai di Kecamatan Singkil dan adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang beresiko menyumbat saluran drainase dan menyebabkan banjir di Kota Manado.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penanggulangan, Banjir**

## PENDAHULUAN

Kota Manado yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara memiliki empat sungai besar, diantaranya Sungai Tondano, Sungai Sawangan, Sungai Bailang, dan Sungai Sario. Dalam waktu singkat di beberapa daerah dataran rendah dan yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) berpotensi terjadi peluapan air Sungai dan terjadi banjir diberbagai titik di Kota Manado. Salah satu sungai yang pernah meluap dan mengakibatkan banjir bandang di Kota Manado yaitu Sungai Tondano. Sungai Tondano berasal dari Danau Tondano mengalir ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Sawangan Air Madidi, Kombos, Wenang Permai, Paal dua lalu masuk ke Kota Manado.

Kecamatan Singkil yang merupakan salah satu daerah yang sering mengalami banjir di Kota Manado, memiliki luas sekitar 592Ha serta memiliki luas daerah rawan banjir sekitar 114Ha, hal ini disebabkan sebagian wilayah Kecamatan Singkil berada di kawasan daerah aliran Sungai dan beberapa Kelurahan berada didataran rendah serta padat penduduk.

Kebijakan Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari beberapa sisi, yaitu dari sisi berbagai peraturan secara khusus mengatur tentang bencana itu sendiri, kebijakan lain yang memiliki kaitan erat dengan penanggulangan bencana, sistem kelembagaan dalam penanggulangan bencana dan kebijakan yang terkait dengan alokasi anggaran di bidang kebencanaan.

Pada dasarnya terdapat berbagai kebijakan yang berkaitan erat dan mempengaruhi kebijakan penanggulangan bencana, salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan Tata Ruang. Mengenai hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Manado Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Pasal 21 ayat (7) Rencana

Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir di Wilayah kota Manado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikembangkan berdasarkan hasil kajian terhadap kawasan-kawasan yang rawan banjir di wilayah Kota Manado, terdapat beberapa poin yang membahas mengenai pengendalian banjir di berbagai titik di Kota Manado termasuk pengendalian banjir di Kecamatan Singkil, yakni :

- a. Normalisasi beberapa sungai besar yang menjadi sumber banjir di wilayah Kota Manado, meliputi Sungai Tondano, Sungai Sawangan, Sungai Bailang, dan Sungai Sario;
- f. Perbaikan sistem drainase dengan rencana penyusunan master plan (rencana induk) drainase untuk seluruh wilayah Kota Manado;
- g. Pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir;

Berdasarkan Perda tersebut menjadi tolak ukur untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan banjir Pemerintah Kota Manado di Kecamatan Singkil dengan menghubungkan indikator masalah dan kebijakan yang direncanakan serta yang telah dilaksanakan Pemerintah.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan Penelitian terdahulu guna sebagai bahan perbandingan serta tolak ukur dari topik/masalah yang diangkat.

Penelitian pertama dilakukan oleh Michelle E.L. Kembuan, Florence Deisy J. Lengkong, Helly Kolondam, Very Y. Londa (2018) mengenai Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana

Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado menggunakan teori Van Meter Van Horn. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado belum berjalan maksimal, dilihat dari 6 variabel implementasi kebijakan yang masih kurang yaitu kurangnya komunikasi, sumber daya manusia yang kurang memadai, disposisi para agen pelaksana kurang dalam hal kejujuran, serta karakteristik agen pelaksana tidak sesuai SOP. Namun standar dan sasaran kebijakan berjalan dengan jelas dan tepat serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik sangat kondusif dalam pelaksanaan kebijakan pendistribusian dana bantuan sosial banjir.

Penelitian kedua dilakukan oleh Murdiningsih, M. S. Pangkey, Welson Y. Rompas (2014) mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa berdasarkan empat variabel Implementasi kebijakan Edward III bahwa aspek sumber daya yakni fasilitas pendukung seperti kendaraan pengangkut sampah belum memadai serta TPS yang kurang terjangkau. Namun, keefektifan pelaksanaannya sudah baik hanya saja belum efisien dari segi waktu penyelesaian yakni belum sesuai dengan yang diharapkan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh In Inriani Sultan, Sunny P.J Rompas, Salmin Dengo (2015) mengenai Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Disiplin

PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Sulut dengan menggunakan metode Kualitatif dan menggunakan teori Edward III. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Kebijakan Disiplin PNS di Sekretariat DPRD Provinsi Sulut sudah baik dilihat dari variabel teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III yakni adanya sosialisasi yang efektif, adanya komitmen yang cukup tinggi, adanya upaya konkrit untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap penerapan disiplin PNS serta penegakan hukum disiplin secara konsisten.

### **KONSEP TEORI**

Definisi kebijakan menurut Iskandar (2012) sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.

kebijakan publik menurut Hayat (2018) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, dibuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan mempunyai tujuan tertentu, serta kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat

Menurut Grindle dalam Kasmad (2013) secara umum implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil, pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya.

Menurut Van Meter dan van Horn (Handoyo, 2012) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Teori implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Kasmad (2013), memberi enam dimensi implementasi kebijakan yang dimaksudkan sebagai variable yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik yaitu :

#### 1. Standar dan sasaran Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah standar dan tujuan-tujuan kebijakan. Indikator keberhasilan dan tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak terjadi berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Terjadinya interpretasi dari tujuan kebijakan akan dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

#### 2. Sumber daya

Sumber-sumber daya yang dimaksud di sini adalah dana, materi, manusia, dan berbagai insentif yang dapat melancarkan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya termasuk pendukung pelaksanaan kebijakan yang hal yang tidak bisa disepelekan

#### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Faktor pendukung ketiga dalam model implementasi ini yaitu yang ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan mengenai karakteristik badan yang melaksanakan kebijakan. Perihal adanya tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana dan adanya komunikasi terbuka sebagai jaringan kerja

komunikasi secara horizontal maupun vertical yang menghasilkan tingkat kebebasan komunikasi dengan para individu pelaksana kebijakan maupun masyarakat.

#### 4. Disposisi para agen pelaksana kebijakan

Dimana setiap komponen dalam kelima model Implementasi Kebijakan akan disaring melalui persepsi dari para implementor mengenai nilai tanggungjawab dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan setelah adanya sikap menunjukkan karakteristik sebagai agen pelaksana.

#### 5. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Komunikasi antar organisasi perlu untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi dalam rangka memperjelas standar-standar atau indikator-indikator kinerja kebijakan. Baik atau tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Demikian pula, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan adanya pendorong atau penguatan terhadap pihak pelaksana. Aktivitas penguatan yang dimaksud adalah technical advice and assistance dan ganjaran baik positif maupun negatif, bagi pihak pelaksana kebijakan.

#### 6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan salah satu faktor pendukung yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena hal merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga dengan lingkungan politik, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya.

Banjir menurut KBBI merupakan peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat yang dapat terjadi karena luapan air akibat hujan terus menerus atau menurunnya kedalaman sungai akibat kepadatan dasar sungai. Kepadatan dasar sungai biasanya terjadi karena adanya kegiatan buang sampah sembarangan ke sungai secara terus-menerus.

Pengertian penanggulangan menurut KBBI yaitu merupakan proses, cara, perbuatan, menanggulangi. Dalam hal ini penanggulangan biasa dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab penyelesaian suatu persoalan.

Penanggulangan banjir merupakan kegiatan antisipasi oleh pemerintah dan masyarakat maupun meminimalisir bencana banjir yang akan datang maupun yang telah datang guna kenyamanan dan keamanan bersama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Denzin dan Lincoln dalam Anggito dan Setiawan (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado, yang dikaji menggunakan model implementasi dari Van Metter dan Van Horn, yaitu mencakup enam dimensi implementasi yakni :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan penanggulangan banjir pemerintah kota Manado
- 2) Sumber daya seperti dana atau insentif lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan, serta sumber

daya manusia sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan banjir

- 3) Karakteristik para agen pelaksana dalam kebijakan penanggulangan banjir
- 4) Disposisi/kecenderungan atau sikap para agen pelaksana (implementor) dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir
- 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan masyarakat dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir
- 6) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung dalam proses implementasi kebijakan

Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Kecamatan Singkil Kota Manado, Pihak-pihak Kelurahan yang berada di kawasan (DAS) yang rawan banjir di Kecamatan Singkil Kota Manado berjumlah empat orang yakni Kelurahan Karame, Kepala Kelurahan Ketang Baru, Kepala Kelurahan Ternate Tanjung, Kepala Kelurahan Ternate Baru, dan masyarakat Kecamatan Singkil yang tinggal di kawasan daerah aliran Sungai berjumlah empat orang, total informan berjumlah 9 (sembilan) orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara. Dengan menggunakan teknik analisis data

(1) reduksi data, sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul-muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

(2) penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, table, grafik, pictogram, dan sejenisnya.

(3) Simpulan dan verifikasi, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dalam penelitian ini dideskripsikan melalui enam indikator teori implementasi kebijakan Van Meter Van Horn sebagai berikut :

### a. Standar dan sasaran kebijakan

Sasaran kebijakan atau tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kecamatan Singkil sudah tepat yakni direalisasikan ditempat yang rawan banjir terutama daerah yang berada di daerah aliran sungai (DAS) di Kecamatan Singkil, namun untuk kebijakan pembangunan tanggul belum direalisasikan secara menyeluruh di kawasan DAS di Kecamatan Singkil. Dan kebijakan Normalisasi Sungai Tondano juga belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga masih dibutuhkan adanya kegiatan pengerukan atau revitalisasi sungai.

Mengenai perbaikan drainase hampir seluruh kelurahan yang berada di kawasan rawan banjir di Kecamatan Singkil sudah dibangun saluran drainase, namun sebagian besar belum adanya kegiatan perbaikan drainase baik pengerukan maupun pembersihan saluran, salah satu penyebab belum adanya perbaikan dan pembersihan saluran drainase adalah karena adanya pandemik Covid-19 sehingga Pemerintah Kecamatan Singkil harus menunda perbaikan maupun kelanjutan pembangunan saluran drainase dan mengalokasikan dana kelurahan ke penanganan Covid-19.

Mengenai standar kebijakan sudah diupayakan dengan diadakan bronjong/Gabion sebagai pengganti tanggul sementara untuk meminimalisir

adanya peluapan air Sungai Tondano di beberapa Kelurahan di Kecamatan Singkil. Namun hal ini masih belum cukup untuk menghalangi peluapan air Sungai Tondano di Kecamatan Singkil.

### b. Sumber Daya

Sumber anggaran dalam kebijakan ini berasal dari pemangku kepentingan atau skateholder terkait namun ada pula yang berasal dari dana Kelurahan untuk pembangunan drainase. Seperti pada Kelurahan Ternate Baru dan Kelurahan Ternate Tanjung pembangunan drainase dilakukan menggunakan dana kelurahan. Serta perbaikan drainase untuk tahun 2020 banyak dialihfungsikan untuk penanganan covid-19.

Sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam proses pengimplementasian kebijakan ini untuk perbaikan saluran drainase di Kelurahan Ternate Tanjung dan Kelurahan Karame bekerjasama dengan Kotaku sehingga untuk tenaga kerja berasal dari Kotaku dan ada sebagian swadaya masyarakat. Sedangkan untuk di Ternate Baru perbaikan drainase dilaksanakan melalui swadaya masyarakat.

Sarana dan prasarana dalam pengimplementasian kebijakan ini berasal dari skateholder terkait sehingga Kecamatan Singkil hanya bersifat menunggu tindak lanjut pembangunan dari Pemerintah.

### c. Karakteristik Agen Pelaksana

Sifat atau karakteristik para skateholder dalam hal ini Para agen pelaksana atau dinas terkait pernah adanya observasi ke kelurahan-kelurahan dan sering melakukan komunikasi dengan Kelurahan terkait maupun Kecamatan apabila akan dilaksanakan pembangunan tanggul, normalisasi Sungai, maupun perbaikan drainase. Para agen pelaksana dalam ruang lingkup Kecamatan-pun sering menghadiri

pembahasan bersama dalam Musrembang.

d. Sikap/Kecenderungan(disposisi) Agen Pelaksana

Sikap atau kecenderungan para agen pelaksana bisa dinilai cukup baik namun hasil belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada beberapa kelurahan di kawasan DAS yang belum adanya pembangunan Tanggul sebagai penghalang peluapan air ke daerah pemukiman masyarakat. Hal ini tentu menjadi evaluasi bagi para skateholder untuk lebih memperhatikan tugas dan tanggungjawab sebagai agen pelaksana.

e. Komunikasi

Komunikasi para skateholder/agen pelaksana dengan Pemerintah Kecamatan Singkil sering dilakukan apabila akan dilaksanakan pembangunan, dan biasanya diselenggarakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap Tahunnya. Komunikasi mengenai akan adanya pembangunan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Singkil selalu di Informasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah setempat, dan Komunikasi bersama masyarakat sering dilakukan melalui acara kegiatan masyarakat, disampaikan langsung, maupun melalui media sosial.

Komunikasi bersama masyarakat sering dilakukan oleh Pemerintah setempat mengenai adanya bantuan untuk masyarakat yang menjadi korban banjir. Bahkan untuk adanya relokasi untuk Normalisasi Sungai hal tersebut sudah diinformasikan kepada masyarakat bahkan masyarakat sangat menyetujui hal tersebut dan memahami kebijakan tersebut. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang kurang menyetujui dikarenakan beberapa alasan, serta

masyarakat masih menunggu adanya kepastian atau keputusan dari pemerintah mengenai tempat relokasi dan bantuan apa yang akan mereka terima.

f. Lingkungan Sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan sosial dalam hal ini merupakan kesadaran masyarakat dan tanggapan masyarakat mengenai kebijakan penanggulangan banjir tersebut, diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Singkil sangat menjaga kebersihan untuk menghindari adanya penumpukan sampah di saluran drainase maupun di Sungai. Bahkan masyarakat mendukung program pemerintah untuk Normalisasi Sungai dan Pembangunan Tanggul di kawasan tempat tinggal mereka yang berada di DAS. Namun saat ini bagi masyarakat yang masih berada di bantaran Sungai mengharapkan adanya kepastian relokasi masyarakat serta bantuan apa yang akan diterima oleh masyarakat.

Mengenai lingkungan ekonomi sesuai observasi dan hasil penelitian bahwa rata-rata kondisi perekonomian masyarakat adalah menengah kebawah. Hal ini juga menjadi sedikit lebih sulit karena adanya Pandemi Covid-19 yang muncul sejak awal Tahun 2020 di Kota Manado yang mengakibatkan pendapatan perekonomian masyarakat menjadi menurun..

Lingkungan politik dalam hal ini sebagai pendukung dalam pengimplementasian kebijakan, sering dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan yang dihadiri oleh Pihak Kecamatan, Pihak-pihak Kelurahan, dan tokoh masyarakat serta sering adanya pembahasan mengenai penanggulangan bencana di Kecamatan Singkil yang dimana saat ini masih menjadi pembahasan utama mengenai Normalisasi Sungai dan pembahasan mengenai penataan ruang bangunan

permukiman masyarakat. Dukungan politik lainnya berasal dari masyarakat yang sebagian besar sangat mendukung kebijakan penanggulangan banjir ini namun masih menunggu kelanjutan pembangunan tanggul dan kepastian dari Pemerintah.

Dari penelitian ini didapati bahwa implementasi kebijakan penanggulangan banjir Pemerintah Kota Manado di Kecamatan Singkil belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada beberapa Kelurahan yang rawan banjir yang belum dibangun Tanggul, serta masih ada beberapa lingkungan di berbagai Kelurahan di Kecamatan Singkil belum adanya perbaikan drainase sebagai saluran air dan bahkan ada beberapa saluran air di Kecamatan Singkil yang tersumbat bahkan kedalaman sedimen drainase banyak yang sudah tidak sesuai dengan semestinya. Mengenai kebijakan Normalisasi sungai di Kecamatan Singkil hal ini belum dijalankan dan masih menjadi pembahasan utama mengenai konsep Normalisasi Sungai dalam Musrenbang, dikarenakan dibutuhkan pengaturan tata ruang permukiman masyarakat serta akses jalur alat berat yang dibutuhkan.

Dengan hal ini Kecamatan Singkil masih dikategorikan sebagai Kecamatan yang rawan banjir di Kota Manado karena implementasi Kebijakan Perda Kota Manado tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado No. 1 Tahun 2014 pasal 21 ayat 7 belum berjalan dengan maksimal.

## **PENURUP**

### **Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan banjir pemerintah Kota Manado di Kecamatan Singkil belum direalisasikan secara menyeluruh, hal ini

disimpulkan melalui indikator penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Pemerintah Kota Manado (studi kasus di Kecamatan Singkil) sebagai berikut:

- a) standar dan sasaran kebijakan belum dilaksanakan secara menyeluruh karena masih ada sebagian wilayah rawan banjir di Kecamatan Singkil yang belum direalisasikan proyek Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai. Hal ini karena terkait dengan kebijakan pembangunan tanggul dan normalisasi sungai bukan dikelola langsung oleh pihak Kecamatan sehingga pihak Kecamatan dan Masyarakat Kecamatan Singkil hanya bersifat menunggu keputusan Pemerintah Kota Manado maupun Dinas terkait. Ada beberapa Kelurahan telah direalisasikan program penanggulangan banjir tersebut namun ada sebagian kelurahan rawan banjir yang proyek Pembangunan tanggulnya belum dilanjutkan bahkan ada yang belum disentuh, serta adanya rencana normalisasi sungai dan relokasi yang belum jelas oleh Pemerintah Kota Manado sehingga Kecamatan Singkil masih dikategorikan sebagai daerah rawan banjir. Akibatnya, sampai saat ini Masyarakat yang berada di daerah aliran sungai masih harus antisipasi jika adanya hujan lebat atau peningkatan volume air sungai secara tiba-tiba.
- b) sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan sarana prasarana dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kecamatan Singkil terkait dengan pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan perbaikan drainase dikelola langsung oleh Dinas PU dan Kotaku atau skateholder terkait, sehingga Pemerintah Kecamatan Singkil hanya bersifat berkoordinasi dan kesiapan lokasi pembangunan. Namun perihal perbaikan drainase ada juga yang

melalui dana kelurahan dan ada juga beberapa Kelurahan dibantu oleh Kotaku. Namun, pada Tahun 2020 Dana Kelurahan untuk perbaikan drainase sebagian besar telah di alokasikan untuk penanganan Covid-19 di Kecamatan Singkil.

- c) Karakteristik para agen pelaksana dinilai cukup baik karena pernah adanya observasi dilokasi daerah rawan banjir di Kecamatan Singkil dan juga menunjukkan sikap loyalitas sebagai agen pelaksana melalui beberapa Pembangunan yang telah direalisasikan.
- d) Disposisi atau kecenderungan para agen pelaksana cukup baik karena dari beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan, telah adanya upaya dari para agen pelaksana atau skateholder terkait untuk merealisasikan Pembangunan Tanggul disebagian kawasan rawan banjir di Kecamatan Singkil. Namun ada beberapa Kelurahan yang masih rawan banjir di Kecamatan Singkil yang belum disentuh untuk pembangunan tanggul maupun normalisasi sungai sebagai penanggulangan banjir oleh Pemerintah Kota Manado. Sehingga Kecamatan Singkil hingga awal tahun 2021 masih mengalami banjir dan menimbulkan kerugian sehingga kekhawatiran masyarakat maupun Pemerintah setempat masih ada sampai sekarang.
- e) Komunikasi agen pelaksana dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan berjalan sangat baik namun bersifat kondisional, begitupun komunikasi dengan masyarakat mengenai pembangunan kebijakan penanggulangan banjir, komunikasi sering dilakukan secara struktural dari Pemerintah Kecamatan ke Kelurahan ke Kepala-kepala Lingkungan lalu kepada masyarakat.
- f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik mengenai pengimplementasian

kebijakan penanggulangan banjir ini sangat didukung oleh masyarakat Kecamatan Singkil. Dan masyarakat yang belum direlokasi sebagian besar berharap adanya informasi lebih lanjut dari Pemerintah mengenai kapan dan dimana mereka akan pindah dan bantuan lain apa yang akan diterima masyarakat, karena rata-rata masyarakat yang bertempat tinggal di daerah aliran sungai adalah berperekonomian menengah kebawah. Untuk dukungan lingkungan politik Pemerintah Kelurahan dan Masyarakat sangat mendukung bahkan berharap adanya kelanjutan pembangunan tanggul di sepanjang DAS Sungai Tondano di Kecamatan Singkil. Selain itu selalu dilakukan pertemuan langsung melalui Musyawarah Rencana Pembangunan oleh pihak kecamatan dengan para agen pelaksana dan pemerintah Kelurahan untuk rencana pembangunan dan penanggulangan banjir di Kecamatan Singkil dan dukungan politik lainnya hanya bersifat sumbangan bantuan ketika adanya banjir di Kecamatan Singkil.

### Saran

Dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir ini peneliti menyarankan bahwa :

- a) Kepada Pemerintah diharapkan adanya perhatian lebih dalam kelanjutan pembangunan tanggul di Kecamatan Singkil, dan adanya kepastian dari Pemerintah kepada Masyarakat mengenai relokasi serta bantuan/jaminan apa yang akan diterima oleh masyarakat jika diharuskan untuk pindah dari tempat tinggal mereka tersebut.
- b) Disarankan adanya sumber daya yang memadai dalam perbaikan drainase agar bisa menyentuh seluruh lingkungan rawan banjir di Kecamatan Singkil
- c) Disarankan adanya perhatian lebih dari Pemerintah dalam Normalisasi Sungai

Tondano di Kecamatan Singkil agar meminimalisir resiko banjir di Kecamatan Singkil dan mengurangi jumlah daerah rawan banjir di Kota Manado.

- d) Kepada masyarakat sangat diharapkan adanya kesadaran dari seluruh masyarakat dalam menjaga kebersihan, dikarenakan salah satu pemicu terjadinya banjir adalah sampah, yang menyumbat saluran drainase dan penumpukan sampah didasar Sungai. Bahkan sampah yang dibuang sembarangan diwilayah lain bisa sampai ke wilayah yang mudah terkena Banjir sehingga menyebabkan menambah resiko banjir di wilayah-wilayah dataran rendah yang rawan banjir hanya karena diakibatkan oleh kelalaian oranglain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggito, A. dan, J, Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik*. Malang: Intrans: Publishung.
- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Kasmad. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Kedai Aksara.
- Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kembuan, M. F, Lengkong. H, Kolondam. V, Londa. 2018. *Implementasi Kebijakan Pendistribusian Dana Bantuan Sosial Banjir di Kecamatan Tikala Kota Manado*. Jurnal Administasi Publik. Universitas Sam Ratulangi. 4(63)
- Murdiningsih. M, Pangkey. W. Rompas. 2014. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Dinas Kebersihan Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi. 2(3)
- Sultan, I. S, Rompas. S, Dengo. 2015. *Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Administrasi Publik. Universitas Sam Ratulangi. 2(30)

#### SUMBER LAIN

- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana. (2010). *Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia*. Jakarta: Diterktorat Pengairan Irigasi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. *Pengertian Banjir*. (<http://kbbi.web.id/banjir.html>)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. *Pengertian Penanggulangan*. (<http://kbbi.web.id/tanggulang.html>)
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Profil Kecamatan Singkil Kota Manado Tahun 2020
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana